

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

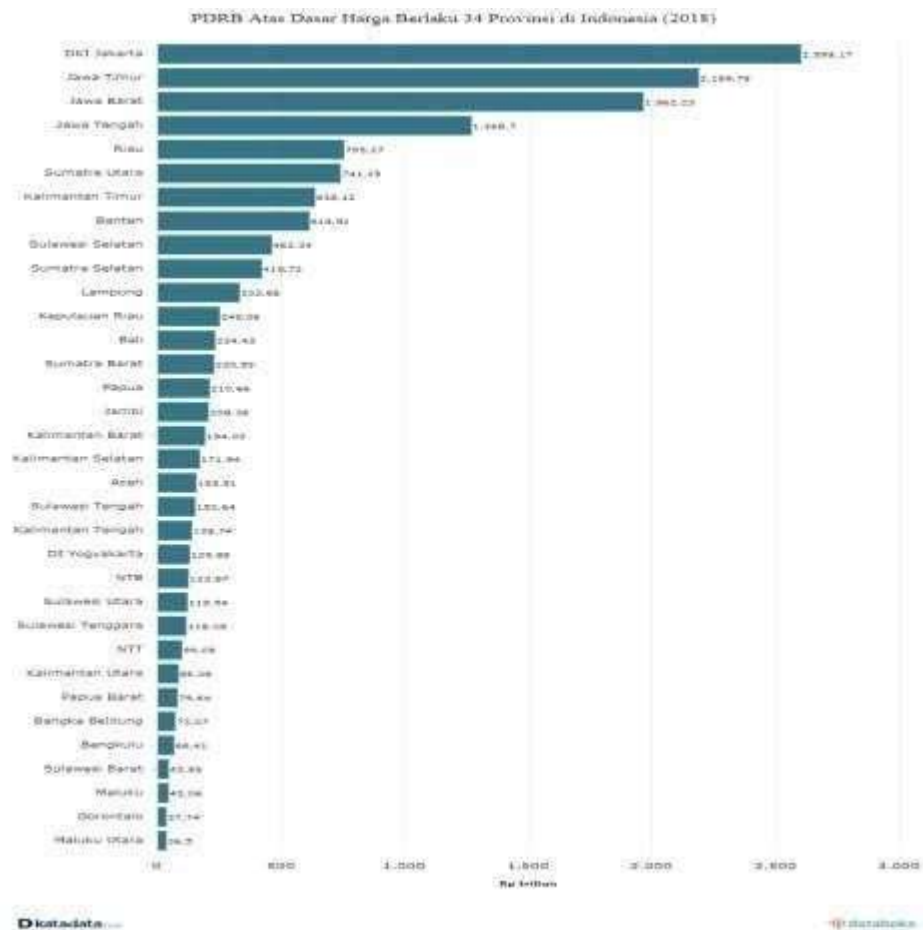
Salah satu peran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi negara adalah. melayani dan melindungi kepentingan masyarakat dan negaranya, (Noor, 2015). Dalam bidang ekonomi, pemerintah mewakili negara untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan atas warganya, (Abiodun Dada, 2017). Peran tersebut dilakukan melalui kebijakan pajak dan anggaran, walaupun ada dua pandangan apakah baik atau buruk bagi perekonomian. (Keho, 2015), mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah bersifat endogen dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi, sehingga pengeluaran harus dibatasi agar tidak tumbuh lebih besar dibanding dengan pertumbuhan ekonomi dan juga ada pengeluaran pemerintah yang bersifat eksogen dalam kaitannya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Gambar di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2012-2018 mencapai rata-rata 5%. Terjadi penurunan tingkat laju pertumbuhan selama 7 tahun terakhir sebesar 1,7% sejak tahun Tahun 2010-2017. Bank Indonesia, (2017), pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif cukup baik karena didorong oleh konsumsi yang kuat dan investasi yang relatif baik. Begitupun juga yang dikatakan BPS (2017), bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5.3%, didorong dari sektor manufaktur, infrastruktur dan perdagangan.

Beberapa hasil penelitian telah menghasilkan bukti-bukti empiris sebagian besar negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi masih memiliki masalah dengan ketimpangan. (Ravallion, 2001 ; Ravallion 2005).

Beberapa studi empiris mencoba meneliti pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Beberapa kalangan peneliti menemukan hasil pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh searah dengan ketimpangan pendapatan. Penelitian yang menyebutkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan diantaranya Menurut Lestari (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif terhadap ketimpangan pendapatan apabila dilakukannya desentralisasi, hal tersebut terjadi karena apabila adanyakenaikan 1% pada PDB maka akan meningkatkan indeks gini sebesar 0,1199% yang berarti jika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka semakin tinggi tinggi pula ketimpangan pendapatan terjadi.

Adapun PDRB Berdasarkan Dasar Harga Belaku 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018 digambarkan dalam Grafik 1.2



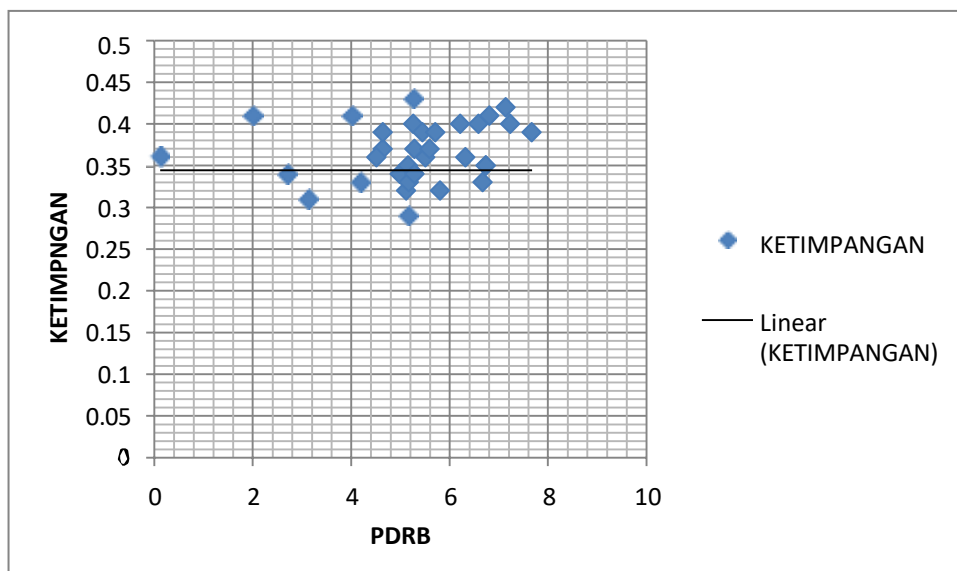
Sumber : BPS (2019)

Grafik 1.2 : Tingkat PDRB atas dasar Harga Berlaku di 34Provinsi di Indonesia pada tahun 2018 (dalam %)

Produk Domestik Regional Bruto 34 provinsi di Indonesia atas dasarharga berlaku pada 2018 tumbuh 9,02% menjadi Rp 14.985,86

triliun dibanding tahun sebelumnya Rp 13.742,29 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2010 tumbuh 5,31% menjadi Rp 10.526,76 triliun dari sebelumnya Rp 9.995,62 triliun.

Dalam asumsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2020-2024, PDRB diproyeksikan tumbuh 5,4% pada 2020 dan 6,1% pada 2024. Untuk PDRB Sumatera diproyeksikan tumbuh 4,86%-5,57%, Jawa dan Bali 5,84%-6,26%, Kalimantan 4,12%-5,24%. Kemudian Sulawesi tumbuh 6,98%-7,34%, Nusa Tenggara tumbuh 3,74%-4,74%. Maluku 6,65%-7,61% dan Papua 5,95%-7,48%. Adapun provinsi dengan PDRB terbesar 2018 adalah DKI Jakarta senilai Rp 2.599.17 triliun. Kemudian diikuti Jawa Timur dengan PDRB Rp 2.189,78 triliun di urutan kedua. Sedangkan empat provinsi di Indonesia bagian timur memiliki PDRB terendah. Keempat provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat (Rp 43,55 triliun), Maluku (Rp 43,06 triliun), Maluku Utara (Rp 36,5 triliun), dan Gorontalo (Rp 37,74 triliun).



Sumber : BPS

Grafik 1.3 Grafik Hubungan PDRB dengan Ketimpangan

Pada grafik tersebut menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh PDRB dan Ketimpangan yang ditunjukkan oleh gini ratio. Pada grafik menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan Ekonomi naik, Ketimpangan pun mengalami kenaikan. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan karena pada dasarnya ketika adanya kenaikan pada suatu pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, maka ketimpangan harusnya menurun. Begitupun sebaliknya ketika ketimpangan suatu negara meningkat maka pertumbuhan ekonomi dalam negara tersebut menurun. Kemudian Provinsi dengan ketimpangan yang rendah seperti Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Kalimantan Utara. Beberapa provinsi di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Selatan mengalami nilai ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi.

Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengurangi ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah atau negara, seperti penelitian dari Liling (2018) yang dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut berarti apabila Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 1% maka ketimpangan wilayah mengalami penurunan sebesar 0,2176%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan turunnya ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Teori dari Sjafrizal (2008)

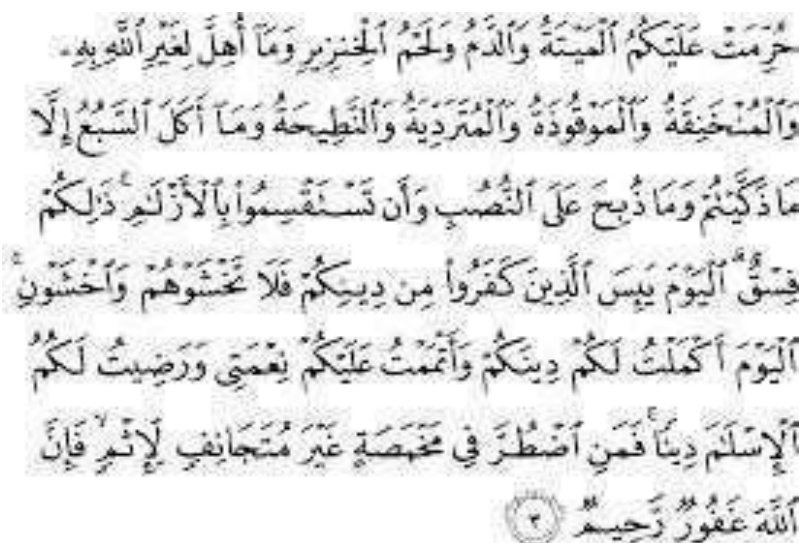
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik.

Menurut Ida (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa struktur ekonomi dengan ketimpangan pendapatan menunjukkan hubungan negatif yang signifikan. Hal ini berarti bahwa dengan menurunnya kontribusi sektor keuangan terhadap pembentukan PDRB menyebabkan ketimpangan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya. Temuan ini sesuai dengan pendapat dari Todaro (2000) yang menyatakan bahwa ketimpangan pada sektor modern yang tengah mengalami pertumbuhan pesat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor tradisional yang relatif stagnan dan konstan.

Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menumbuhkan sektor investasi dengan menggunakan instrumen pasar modal. Oleh sebab itu, sektor pasar modal merupakan salah satu sektor yang sangat diperhatikan di Indonesia. Selain itu, pasar modal juga merupakan instrumen yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dan dunia, mengingat pada saat ini pasar modal, seperti juga perbankan adalah media yang mampu menjadi jembatan bagi pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan modal. Didalamnya terhubungkan begitu banyak pelaku ekonomi tanpa batas negara (Esta Lestari, 2008).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, pemerintah menerapkan kebijakan anggaran ekspansif. Efek dari kebijakan ini adalah adanya pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan negara. Kondisi pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan negara biasa disebut sebagai defisit anggaran. Dalam membiayai defisit anggaran, pemerintah memiliki berbagai instrumen baik berupa pinjaman langsung maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Untuk membiayai defisit anggaran tersebut Pemerintah dapat pula melakukan mobilisasi dana dari masyarakat atau menghimpun dana partisipasi masyarakat untuk membiayai defisit anggaran melalui penerbitan Surat Berharga Negara (Solikhun, Agus, Handrizal, 2017).

Ekonomi syariah merupakan suatu realitas yang terus menghadirkan kesempurnaan dirinya di tengah beragamnya sistem ekonomi dunia, terutama spektrum ekonomi sosialis dan ekonomi konvensional dengan berbagai variannya. Kesempurnaan Islam tersebut dipertegas dalam firman Allah Q.S al-Maaidah ayat 3



artinya :

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampunlagi Maha Penyayang.”

Melalui ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai agama yang sempurna tentu saja Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sudah diatur dalam al-Quran dan Sunnah (Nasution, 2006). Oleh karenanya, di tengah kedua arus ekonomi konvensional dan ekonomi sosialis, ekonomi syariah hadir sebagai kekuatan baru yang sedang membentuk diri menjadi sebuah sistem yang mandiri dan matang.

Salah satu produk dari Ekonomi syari’ah adalah Pasar Modalsyari’ah dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hadirnya peluncuran produk Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management yang dinyatakan hadir secara resmi pada 14 Maret 2003, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapepam LK (saat ini menjadi Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN MUI menjadi pijakan dukungan yang kuat terhadap pengembangan pasar modal berbasis

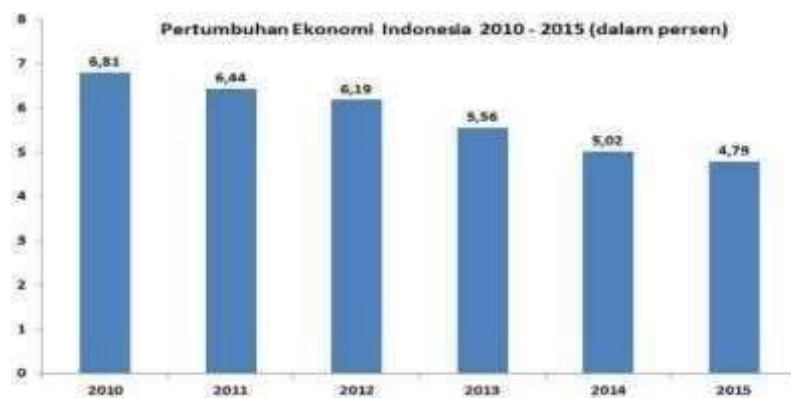
prinsip syariah di Indonesia yang menyepakati adanya pola hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk keuangan syariah khususnya dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya (Adrian Sutedi, 2011).

Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management dengan meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada 30 Juli 2000 yang melisting 30 saham berbasis syariah. Tujuan diluncurkannya JII adalah untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah (Andri Soemitra, 2009).

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang membina dan mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia dalam berbagai kebijakannya juga aktif mendorong pengembangan produk syariah di pasar modal Indonesia. Berbagai kebijakan dituangkan dalam Road Map Pasar Modal Syariah Indonesia 2015-2019 yang mencakup strategi dan program yang merupakan kelanjutan dari strategi dan program yang tertuang dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 dan 2010- 2014, serta sejumlah peraturan khusus yang mengatur penerbitan produk syariah di pasar modal Indonesia sejak tahun 2006.

Dengan hadirnya Pasar modal syari'ah, diharapkan mampumengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah berkembang dengan cukup baik, meskipun tidak secepat perkembangan perbankan syariah. Namun, dalam hal ini memiliki kecenderungan yang terus meningkat, sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Pasar modal syariah sebaiknya melakukan upaya pengenalan produk-produknya kepada masyarakat. Industri perbankan sebaiknya juga melakukan upaya pengenalan terhadap produk- produknya (Fauzan, 2017).

Adapun grafik perkembangan saham syariah dapat dilihat seperti diagram di bawah ini:



Sumber : BPS.go.id

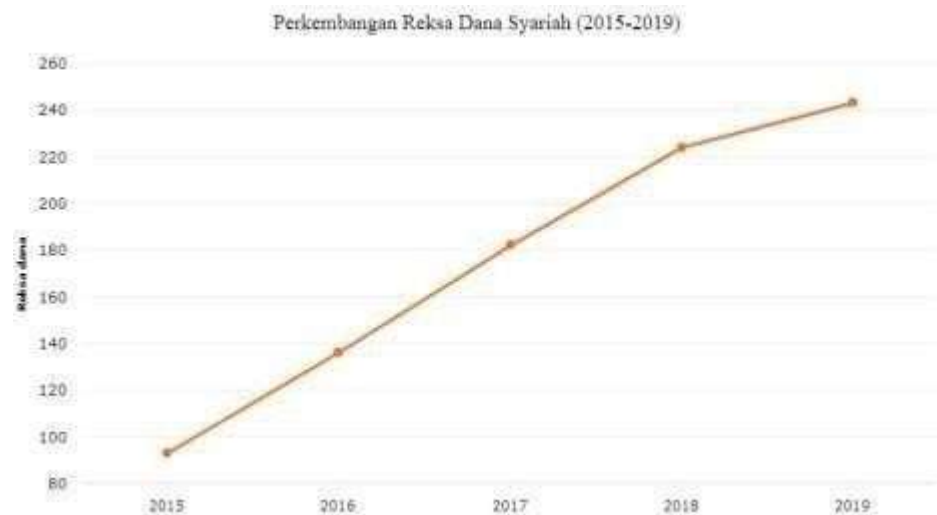
Grafik 1.4. Diagram Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010 - 2015 (dalam %)

Dari gambar diagram di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2015 terus mengalami penurunan dan terjadi perlambatan ekonomi, yaitu pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,81 persen terus mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 6,44 persen, pada tahun 2012 sebesar 6,19 persen, pada tahun 2013 sebesar 5,56 persen, pada tahun 2014 sebesar 5,02 persen dan pada tahun 2015 sebesar 4,79 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 merupakan yang terendah dalam 6 (enam) tahun terakhir. Lesunya perekonomian global pada beberapa tahun terakhir membuat pertumbuhan ekonomi di dunia dan di Indonesia melambat. Salah satu penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah anjloknya konsumsi rumah tangga. Sepanjang tahun 2015, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,96 persen, angka tersebut lebih rendah dibanding 2 (dua) tahun sebelumnya, yang mencapai 5,43 persen pada tahun 2013 dan 5,16 persen pada tahun 2014. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan pasar modal syariah, di satu sisi pasar modal syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan pertumbuhan baik dari segi jumlahnya maupun nilainya sedangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat dari gambar diagram pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas.

Kemudian, Reksa dana syariah meluncurkan Manulife Dana Kas Syariah (MDKS). Program ini hadir karena adanya kebutuhan investasi masyarakat Indonesia dengan harapan mampu

memberikan minat investasi masyarakat Indonesia itu sendiri dan mampu menjadi pelengkap dalam investasi saham syariah di Indonesia.



Sumber : BPS.go.id

Gambar 1.5 Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019

Berdasarkan laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), reksa dana syariah sejak 2015 hingga 2019 menunjukkan tren positif. Jumlah reksa dana syariah yang diterbitkan meningkat 161,29%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan jumlah reksa dana syariah mencapai 8,48%. Jumlah reksa dana syariah pada 2019 sebanyak 243 reksa dana dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Rp 35,38 triliun. Pada 2018 jumlah reksa dana syariah mencapai 224 reksa

dana dengan NAB Rp 34,49 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan jika dibandingkan dengan 2015 ketika produk reksa dana syariah hanya 93 produk dengan NAB Rp 11,02 triliun.

Perkembangan instrumen investasi syariah di pasar modal jugaterus mengalami pertumbuhan dan terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah (*sukuk*) PT. Indosat, Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah *ijarah*.



Grafik 1.6 Diagram Perkembangan Penerbitan Obligasi Syariah (*Sukuk*) dan Obligasi Syariah (*Sukuk*) yang Masih Beredar (*Outstanding*) Tahun 2010 2016 (Triliun Rupiah)

Dari gambar diagram di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 obligasi syariah (*sukuk*) terus mengalami pertumbuhan. Sampai dengan bulan Februari tahun 2016 jumlah penerbitan sukuk

mencapai 87 penerbitan. Jumlah outstanding sukuk (sukuk yang masih beredar mencapai 46 sukuk sampai pada akhir Februari tahun 2016). Adapun jumlah nominal sukuk korporasi yang beredar sampai dengan akhir Februari tahun 2016 senilai Rp. 9.802.000.000.000 (sembilan triliun delapan ratus dua milyar rupiah). Pada tahun 2016, pemerintah juga sukses menjual sukuk seri SR-08 dengan nilai Rp. 31,5 triliun dengan jumlah investor

48.444 orang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia perlu adanya peran pasar modal syariah sebagai pendorongnya. Namun dalam hal ini, diperlukan analisis dan evaluasi secara akademis karena telah banyak studi yang menganalisis hubungan diantara pasar modal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang juga berdampak padaketimpangan tapi masih sedikit yang menganalisis keterkaitan antara peran pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dengandampaknya kepada ketimpangan Ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian penulis berkeyakinan bahwa Otoritas JasaKeuangan (OJK) sebagai otoritas pasar modal di Indonesia di bantuoleh Kementerian Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dapat mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia sebagai salah satu alternatif investasi di Indonesia dengan berbagai penambahan produk investasi syariah di pasar modal

syari'ah sesuai dengan keinginan dan permintaan investor, karena investor memiliki kecenderungan investasi yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya pasar modal syari'ah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal-haltersebut diatas menjadi alasan kuat dan dasar bagi peneliti untuk menguraikannya dalam penulisan skripsi dengan judul “ **ANALISIS PERAN PASAR MODAL SYARI'AH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA** “

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana perkembangan Peran Pasar Modal syariah terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia ?
- b. Apakah terdapat pengaruh pada Peran Pasar Modal syariah terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia?
- c. Apakah terdapat perbedaan dalam Peran Pasar Modal syariah terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perkembangan antara Peran Pasar Modal syariah terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh antara Peran Pasar Modal syariah terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia
- c. Untuk mengetahui perbedaan Peran Pasar Modal syariah terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasildari penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi pembaca.

Bagi saya pribadi sebagai salah satu media latih untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.

1.4.2 Kegunaan Empiris

Adapun kegunaan empiris dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini akan menghasilkan usulan atau rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk bahan evaluasi dalam meningkatkankinerja dalam membuat kebijakan demi tercapainya masyarakatyang sejahtera
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan bagi berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan Dalam membuat kebijakan Ekonomi.

